



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

MASA BHAKTI 2014 - 2019



Gedung DPR Papua

Jl. DR. Sam Ratulangi No. 2 Jayapura – Papua
Telp. (0967) 533691 – 533580 -523854 Fax (0967)531922 PO. Box.18

KATA PENGANTAR



Dengan memanajatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan anugerah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penerbitan Booklet Profil Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2014 - 2019.

Booklet ini memua informasi terkait profil Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2014 - 2019, yang diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dengan Dewan, sehingga dapat terjalin komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan disamping tentunya diharapkan melalui booklet ini masyarakat dapat mengetahui secara benar prosedur dan mekanisme penyalura aspirasi secara proporsional. Bagi masyarakat dapat memahami figur para wakil rakyat yang ada di DPR Papua, sedangkan Dewan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, Dewan diharapkan peka terhadap aspirasi dan isu yang sedang berkembang di masyarakat, dilain pihak masyarakat bisa memahami aktifitas dan kegiatan para wakilnya di DPR Papua. Booklet ini juga memuat foto-foto para Anggota Dewan, terutama foto kegiatan awal Dewan serta mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Mekanisme Pembahasan Raperdasi/ Raperdasi yang notabena merupakan produk hukum yang dimanatkan oleh UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua serta Struktur Organisasi Sekretariat DPR Papua.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penerbitan booklet ini, baik segi penampilan maupun isinya, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan agar penerbitan ditahun - tahun berikutnya dapat lebih baik. Bagi masyarakat yang masih membutuhkan tambahan informasi dapat langsung ke kantor Sekretariat DPR Papua di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 2 Jayapura – Papua Telp. (0967) 533691 – 533580 - 523854 Fax (0967)531922 .

Jayapura, Juli 2017

SEKRETARIS DPR PAPUA

Dr.JULIANA J WAROMI,SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660314 198603 2 012

SAMBUTAN KETUA DPR PAPUA



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Booklet Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dapat diselesaikan dengan baik. Selaku Ketua DPR Papua saya menyambut baik atas terbitnya booklet ini sebagai sarana publikasi dan informasi tentang lembaga DPR Papua.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh rakyat Papua yang telah memberikan kepercayaan dan inspirasi untuk selalu melaksanakan tugas dan fungsi yang kami emban dengan sebaik-baiknya. Dengan terbitnya buku ini mudah – mudahan dapat mengakomodir keinginan masyarakat untuk mengetahui lebih dekat terhadap keberadaan lembaga DPR Papua, sekaligus memenuhi tuntutan rakyat Papua yang sangat dinamis sehingga diperlukan sikap terbuka, transparan dan akuntabel atas pelaksanaann tugas, fungsi dan wewenang DPR Papua.

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dengan terbitnya booklet ini akan memberikan manfaat bagi rakyat Papua dan menjadi komitmen bagi kami untuk terus berjuang bagi kepentingan rakyat Papua.

Demikian, terima kasih.

Jayapura, Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
KETUA

YUNUS WONDA,SH,MH

PERKEMBANGAN DPR PAPUA SEJAK 1963 SAMPAI SAAT INI

DPR-GR & DPRD PROVINSI IRIAN JAYA

Perjalanan dan sepak terjang DPRD-GR menjadi DPRD Propinsi Irian Jaya tidaklah terlepas dari sejarah perjalanan pembentukan Propinsi Irian Barat yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Nomor 1 Tahun 1963. Penetapan tentang Pemerintahan di wilayah Irian Barat itu meletakkan tugas kepada Pemerintah Propinsi baru untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di daerahnya. Menjelang pelaksanaan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), kembali Pemerintah dan DPR mengeluarkan / menetapkan UU Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan kabupaten - kabupaten sebagai Daerah Otonom. Penetapan Presiden dan UU tersebut diatas ditujukan khusus untuk daerah Propinsi Irian Barat sedangkan untuk pelaksanaan pemerintahan yang berlaku di seluruh Indonesia masih digunakan UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. UU tersebut terakhir telah digantikan oleh UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah yang berlaku diseluruh Indonesia pada 23 Juli 1974. Sedangkan di Irian Barat mulai berlaku 2 Januari 1975 dengan Instruksi Mendgri Nomor 26 Tahun 1974.

Seiring terbentuknya Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya, maka terbentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat di Propinsi Irian Barat yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR), berlangsung dari tahun 1963 hingga tahun 1971. Meski keberadaan DPRD-GR tidak terlalu lama namun kontribusi melalui Peran dan Kiprah terhadap pembangunan dan eksistensi daerah ini sangatlah besar, antara lain : *Pertama*, suksesnya pelaksanaan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang menghasilkan suatu konsensus politik bahwa Irian Barat tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan disahkan dengan Surat Keputusan Nomor : 6/DPRDGR-1969 tanggal 5 Agustus 1969 tentang Dukungan dan Hasil Sidang PEPERA. *Kedua*, Pemeritahan Irian Barat memperoleh Otonomi Daerah sesuai UU No. 12 Tahun 1969 tanggal 16 September 1969 dan *Ketiga*, munculnya generasi muda orang asli Papua dalam pentas Politik dan Pemerintahan Nasional Republik Indonesia.

DPR PAPUA DAN ERA OTONOMI KHUSUS

Gerakan Reformasi (Tahun 1998) yang bergulir di Indonesia telah memberikan dampak yang luar biasa di Papua. Ruang kebebasan yang terbuka lebar pasca runtuhnya Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto memungkinkan rakyat Papua menyampaikan aspirasi politiknya dan untuk menjawab aspirasi rakyat Papua tersebut, pada tanggal 21 November 2001 Pemerintah Pusat memberikan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (disingkat UU Otsus). Suatu instrument kebijakan nasional yang memuat pembagian kewenangan (Sharing Of Power) antara Pusat dan Daerah dengan kebijakan desentralisasi yang lebih memadai dan terarah berlandaskan pada pengakuan identitas dan hak dasar Orang Asli Papua, peningkatan alokasi dana pembangunan dalam rangka pemulihan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan pemberlakukannya UU Otsus tersebut, pada tanggal 22 Juni 2005 melalui Sidang Paripurna Khusus, DPRD Provinsi Papua secara resmi mengalami perubahan nomenklatur dari DPRD Provinsi Papua menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 4/DPRD/2005 tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga DPRD Provinsi Papua menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Dan diperkuat dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Mei 2005 Nomor 161.81./1034/SJ perihal Penggantian Nama DPRD Provinsi Papua menjadi DPR Papua. Perubahan nomenklatur ini mestinya sudah harus dilakukan pada tahun 2001 bersamaan dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2001, mengingat pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan; Pemerintah Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai Badan Legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai Badan Eksekutif serta kekuasaan Legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP. Namun baru dilakukan pada Tahun 2005 mengingat dalam kurun waktu tersebut DPRD Provinsi Papua lebih disibukkan dengan hal-hal politik sehingga sangat mempengaruhi konsentrasi dewan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus, salah satunya adalah terkait perubahan Nomenklatur lembaga DPRD.

PERJALANAN PERUBAHAN NOMENKLATUR DPR PAPUA

1. Tahun 1963 disebut DPR – GR Propinsi Irian Barat;
2. Tahun 1971 disebut DPRD Propinsi Irian Barat;
3. Tahun 1973 disebut DPRD Propinsi Tingkat I Irian Jaya;
4. Tahun 1999 disebut DPRD Provinsi Irian Jaya;
5. Tahun 2000 lewat Rapat Paripurna Khusus pengembalian Nama DPRD Provinsi Irian Jaya menjadi DPRD Papua tepatnya tanggal 16 Agustus 2000;
6. Tahun 2001 terbit UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Prov.Papua;
7. Tanggal 15 Maret 2005 melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Papua dihasilkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga DPRD Provinsi Papua. Hasil Rapat Paripurna tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Surat Nomor : 161.2/245 Tanggal 15 Maret 2005, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Papua melalui Surat yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor : 005/GUB-PP/SUS/III/005;
8. Tanggal 3 Mei 2005 Terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.81/1034/SJ Perihal Pergantian Nama DPRD Provinsi Papua menjadi DPRP Provinsi Papua;
9. Tanggal 22 Juni 2005 melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Papua,diputuskan Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 4/DPRD/2005 tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga DPRD Provinsi Papua menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Dengan keputusan tersebut, terhitung melalui tanggal 22 Juni 2005 nomenklatur DPRD Provinsi Papua berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

KEANGGOTAAN DPR PAPUA

Keanggotaan DPR Papua dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan bergulirnya waktu. Diawali dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat di Propinsi Irian Barat yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR), berlangsung dari tahun 1963 hingga tahun 1971. Keanggotaan DPRD-GR Periode Mei 1963 – Oktober 1971 ini tidak dipilih melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu) melainkan diangkat dan atau diberhentikan oleh Presiden berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Jumlah Anggota DPRD-GR selama periode berjalan sebanyak 35 orang atau jumlah lain sesuai keputusan Presiden. Dalam periode ini juga, tepatnya Mei 1963 sampai Maret 1969 jabatan Ketua dan Wakil Ketua dijabat langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dan baru berakhir setelah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1969. Pada periode berikutnya, April 1969 hingga saat ini jabatan Ketua dan Wakil Ketua tidak lagi dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Seiring perkembangan waktu, masa keanggotaan DPRD-GR juga mengalami pasang surut, dimana sejak gagalnya pemberontakan PKI sampai tahun 1970 cenderung dikatakan sebagai DPRD-GR Zaman Orde Baru. DPRD berikutnya yang hanya berusia setahun (periode 1970-1971) dikenal dengan DPRD PERMEN. Sedangkan DPRD sejak 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1999, 2004 adalah DPRD Hasil Pemilihan Umum.

Sementara itu, keanggotaan DPR Papua dalam era Otonomi Khusus juga mengalami perkembangan yang signifikan, dimana sesuai pasal 6 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua jumlah anggota DPRP berjumlah $1\frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah Anggota DPRD Provinsi Papua. Artinya dari total jatah 45 kursi untuk DPRD Provinsi Papua sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, jumlah kursi DPR Papua dari jatah 45 kursi ditambah 11 kursi amanat Otsus, maka total jumlah kursi DPR Papua adalah 56 kursi. Keanggotaan DPR Papua pada era Otsus juga merupakan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu Pemilu 1998 dan Pemilu 2004. Meski sama-sama dipilih melalui Pemilu namun ada yang membedakan keanggotaan DPR Papua hasil Pemilu tahun 1998, 2004 dan 2009 ini, dimana keanggotaan DPR Papua Periode 1998 - 2004 dipilih oleh rakyat melalui Partai Politik tetapi keberadaannya dilembaga legislatif ditentukan oleh Partai Politik. Sementara Keanggotaan DPR Papua Periode 2004 – 2009 , Periode 2009 – 2014 dan Periode 2014 – 2019 yang adalah hasil Pemilu Legislatif tanggal 09 April 2014 dan dilantik pada 31 Oktober 2014 lalu ini dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

PERAN DAN FUNGSI DPR PAPUA

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah memberikan posisi dan ruang yang luas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), tidak saja telah melahirkan pembagian kewenangan (sharing of power) antara Pemerintah Pusat tetapi juga telah memberikan ruang dan kewenangan yang lebih besar kepada DPR Papua sebagai unsur lembaga Pemerintah Daerah dalam memainkan peran dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Meski secara de facto peran DPR Papua tidak lagi “superior” diatas Pemerintah Daerah tetapi telah mendekati mitra kerja, peran dan fungsi DPR Papua tetapi tidak ada yang mengalami perubahan, diantaranya; Fungsi Legislasi (diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah bersama Kepala Daerah), Fungsi Anggaran (diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah), dan Fungsi Pengawasan (diwujudkan dalam bentuk Pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah). Dengan demikian dapat dikatakan penyelenggaraan Otonomi Khusus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPR Papua sebagai lembaga penyalur aspirasi dan mandat masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis.

TUGAS DAN WEWENANG DPR PAPUA

Meski secara de facto Fungsi DPR Papua tidaklah mengalami perubahan, namun secara de jure sebagaimana amanat pasal 7 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang pelaksanaannya selanjutnya diatur Peraturan DPR Papua Nomor 01 / DPRP / 2014 tentang Tata Tertib DPR Papua. Tugas dan wewenang DPR Papua, antara lain:

- a. Membentuk Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus bersama Gubernur dengan pertimbangan MRP;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perdasi tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur ;
- c. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasi dan Perdasus serta pelaksanaan APBD dan termasuk pelaksanaan UU Otsus, dan peraturan Gubernur;

- d. Mengusulkan pengagatan dan/atau pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan dan pemberhentian;
- e. Memilih Gubernur Papua;
- f. Bersama Gubernur menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Papua dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJM Nasiobal dan memperhatikan kekhususan Provinsi Papua;
- g. Memberikan pendapat dan perimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- h. Memberikan persetujuan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
- i. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi;
- j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan penyebarluasan/sosialisasi Perdasi dan Perdasus.

Orientasi pelaksanaan tugas dan wewenang dikaitkan dengan fungsi DPR Papua yang diamanatkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah membahas dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Penetapan Perdasi / Perdasus pada prinsipnya dimaksudkan sebagai aturan pelaksana dari konsiderens UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU No.35 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus) dalam rangka meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana amanat Otonomi Khusus. Sesuai amanat pasal 29 UU No. 21 Tahun 2001, Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) sementara Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua bersama – sama dengan Gubernur. Pembentukan Perdasi / Perdasus dimaksudkan untuk memproteksi Hak – Hak Dasar Orang Asli Papua dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, seperti penghargaan kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, social

budaya, adat istiadat, eksistensi hak ulayat dan masyarakat adat dan syarat lain, yang memungkinkan Peraturan Daerah itu dapat memberikan proteksi yang maksimal bagi keberlangsungan hidup masyarakat asli Papua.

HAK DAN KEWAJIBAN DPR PAPUA

Hak dan Kewajiban DPR Papua sesuai pasal 8, 9 dan 10 UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang pelaksanaannya kemudian diatur dalam Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014. Hak DPR Papua terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, Hak DPR Papua secara kelembagaan dan Hak Anggota DPR Papua, demikian halnya dengan kewajiban DPRP.

1. HAK DPR PAPUA

Hak DPR Papua sesuai Pasal 10 Peraturan DPR Papua Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRP, antara lain :

- a. Hak Interpelasi adalah hak DPR Papua untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hak Angket adalah hak DPR Papua untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR Papua untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.

2. HAK ANGGOTA DPR PAPUA

Hak Anggota DPR Papua sesuai Pasal 19 Peraturan DPR Papua Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRP, antara lain :

- a. Mengajukan Rancangan PERDASI dan PERDASUS.
- b. Mengajukan Pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri

- f. Imunitas adalah Hak setiap anggota DPR Papua untuk tidak dapat disidik oleh Kepolisian Negera RI dan Kejaksaan RI dan dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPRP ataupun diluar rapat DPR Papua yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRP.
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- h. Protokoler
- i. Keuangan dan administrasi

3. KEWAJIBAN ANGGOTA DPR PAPUA

Selain Hak, Anggota DPRP juga mempunya Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan DPR Papua Nomor 01 Tahun 2014, antara lain :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-undangan.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.
- d. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan Pribadi, Kelompok dan golongan.
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Mentaati Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Menyerap & menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA PERIODE 2014 – 2019

Keanggotaan DPR Papua Periode 2014 – 2019 merupakan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tanggal 9 April 2014 dengan jumlah Anggota sebanyak 55 orang. Keberadaan Anggota Dewan di lembaga DPR Papua yang diambil Sumpah/Janjinya pada tanggal 31 Oktober 2014 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

PIMPINAN DPR PAPUA

Pimpinan DPR Papua berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 01/DPRP/2014 Tentang Penetapan Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

Ketua : YUNUS WONDA,SH,MH

Wakil Ketua : 1. FERNANDO A.Y.TINAL,BA
2. EDOARDUS KAIZE,SS
3. YANNI,SH

PIMPINAN DPR PAPUA PERIODE 2014 -2019



KETUA
YUNUS WONDA,SH,MH



WAKIL KETUA
EDOARDUS KAIZE,SS



WAKIL KETUA
FERNANDO A.Y.TINAL,BA



WAKIL KETUA
YANNI,SH

FRAKSI – FRAKSI DPR PAPUA

Susunan Komposisi Pimpinan dan Anggota Fraksi – Fraksi DPR Papua berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/DPRP/2014, adalah sebagai berikut

1. FRAKSI DEMOKRAT

KETUA	:	JUS JEFRY KAUNANG, SE
WAKIL KETUA	:	YARIUS BALINGGA, SE
SEKRETARIS	:	FRANGKY ISMAEL FONATABA
BENDAHARA	:	MARIA DUWITAU
ANGGOTA :		<ol style="list-style-type: none">1. DRS. MUSTAKIM, HR, SE, SH2. BOY MARKUS DAWIR3. RUBEN MAGAI, SIP4. THOMAS SONDEGAU, ST5. YUNUS WONDA, SH, MH6. CAROLUS KIA KELEN BOLI, SE, MM7. PENDIS ENUMBI8. ORGENES WANIMBO9. DENIUS KULUA, S.SOS10. EMUS M. GWIJANGGE11. BOBIRUS YIKWA, S.PD, M.SI12. JOHNY BANUA ROUW,SE

PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI DEMOKRAT DPRP



KETUA
J.JEFRY KAUNANG, SE



WAKIL KETUA
YARIUS BALINGGA,SE



SEKRETARIS
FRAKY I FONATABA



BENDAHARA
MARIA DUWITAU



THOMAS SONDAU,ST



RUBEN MAGAI,S.I.P



BOY M DAWIR



MUSTAKIM HR,SE



ANGGOTA
ORGENES WANIMBO



ANGGOTA
PENDIS ENUMBI



ANGGOTA
CAROLUS.K.K.BOLLY



ANGGOTA
YUNUS WONDZA,SH,MH



ANGGOTA
DENIUS KULUA,S.Sos



ANGGOTA
EMUS GWIJANGGE



ANGGOTA
BOBIRUS YIKWA,S.Pd



ANGGOTA
JONNY BANUA ROUW, SE

2. FRAKSI PDI-PERJUANGAN

KETUA : HERMAN YOGOBI

WAKIL KETUA : ANTHON H. NORIWARI
SEKRETARIS : MARTEA MAMOYAO, S.Sos
BENDAHARA : KRISTHINA R. I. LULUPORO, S.IP
ANGGOTA : 1.LAZARUS SIEP, S.IP
2.YAKOBA LOKBERE, SE,SH,M.KP
3.EDOARDUS KAIZE, SS

PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI PDI-PERJUANGAN DPRP



3. FRAKSI PARTAI GOLKAR

PENASEHAT : 1. FERNANDO A. Y. TINAL, BA

2. JAN L. AYOMI, S.Sos
KETUA : IGNASIUS W. MIMIN, S.IP
SEKRETARIS : CHRIS RISAMASU
BENDAHARA : TAN WIE LONG
ANGGOTA : DEERD TABUNI, SE, M.Si

PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI GOLKAR DPRP



PENASEHAT
F.A.Y. TINAL,BA



PENASEHAT
JAN L. AJOMI, S.Sos



KETUA
IGNASIUS W MIMIN,S.IP



SEKRETARIS
CHRIS RISAMASU



PBENDAHARA
TAN WIE LONG



ANGGOTA
DEED TABUNI,SE,M.SI

4. FRAKSI GERINDRA

KETUA : RADIUS SIMBOLON, SE, MBA

WAKIL KETUA : Drs. JOHN IBO, MM
SEKRETARIS : NATAN PAHABOL, S.Pd
ANGGOTA : 1. YANNI, SH
2. ELVIS TABUNI, SE
3. DEKI NAWIPA, SE

PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI GERINDRA DPRP



KETUA
R.SIMBOLON,SE,M.BA



WAKIL KETUA
DRS.JOHN IBO,MM



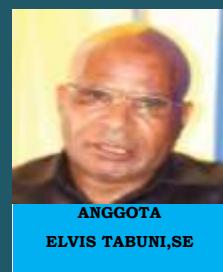
SEKRETARIS
NATAN PAHABOL,S.Pd



ANGGOTA
YANNI,SH



ANGGOTA
DECKY NAWIPA



ANGGOTA
ELVIS TABUNI,SE

5. FRAKSI HATI NURANI RAKYAT

KETUA : YAN P. MANDENAS. S.Sos,M.Si

WAKIL KETUA : NIKIUS BUGIANGGE
SEKRETARIS : HERLIN BEATRIX M. MONIM, SE
BENDAHARA : STEFANUS KAISEPO
ANGGOTA : 1. KAMASAN YAKOP KOMBOY
 2. WILHELMUS PIGAI
 3. Drs. MUHAMMAD NAWAWI
 4. GERSON SOMA, S.Th
 5. LAURENZUS KADEPA
 6. H. SYAMSUNAR RASYID

PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI HATI NURANI RAKYAT DPRP



KETUA
YAN P MANDENANS,M.Si



WAKIL KETUA
NIKIUS BUGIANGE



SEKRETARIS
HERLIN.B.MONIM,SE



BENDAHARA
STEVANUS KAISEPO



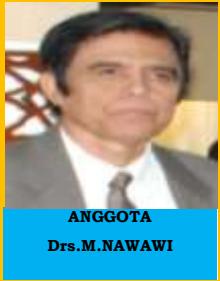
ANGGOTA
GERSON SOMA,S.Th



ANGGOTA
KAMASAN Y KOMBOY



ANGGOTA
WILHELMUS PIGAY



ANGGOTA
Drs.M.NAWAWI



ANGGOTA
LAURENZUS KADEPA



ANGGOTA
H.SYAMSUNAR RASYID

6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KETUA : AGUS KOGOYA, S.IP, M.Si

WAKIL KETUA : ORGENES KAWAY,S.Th
SEKRETARIS : NASON UTTI,SE
ANGGOTA : 1. JANUARIUS L. DOUW, SH
2. MADAI KOMBO

PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI GABUNGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRP



KETUA
AGUS KOGOYA,S.I.P,M.Si



WAKIL KETUA
ORGENES KAWAY,S.Th



SEKRETARIS
NASON UTTI,SE



ANGGOTA
JANUARIUS L DOUW,SH



ANGGOTA
MADAI KOMBO

7. FRAKSI KEADILAN NASIONAL

KETUA : SINUP BUSUP, SE, M.Si

SEKRETARIS : KUSMANTO,SH
BENDAHARA : TAMI GURIK, SE
ANGGOTA : 1. Ir. H. RUSTAM SARUH, MM
 2. NIOLUEN KOTOUKI

PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI KEADILAN NASIONAL DPRP



KETUA
SINUT BUSUP,SE,M.Si



SEKRETARIS
KUMANTO,SH



BENDAHARA
TAMI GURIK



ANGGOTA
Ir.H.RUSTAM SARUH



ANGGOTA
NIOLUEN KOTOUKI

KOMISI – KOMISI DPR PAPUA

Komisi merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap.Komposisi Pimpinan dan Anggota Komisi – Komisi DPRP Periode 2014 – 2019 ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 02/PIM-DPRP/ 2014 Tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penetapan Susunan komposisi Pimpinan dan keanggotaan Komsi DPR Papua Masa Jabatan 2014 – 2019. Adapun Komposisi susunan Pimpinan dan Anggota Komisi – Komisi DPRP Masa Jabatan 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

1. KOMISI I (BIDANG PEMERINTAHAN)

KETUA : ELVIS TABUNI,SE

WAKIL KETUA : ORGENE WANIMBO

SEKRETARIS : MATHEA MAMEYAO,S.Sos

ANGGOTA : 1. RUBEN MAGAI,S.IP
2. EMUS M GWIJANGGE
3. TAN WIE LONG
4. H.SYAMSUNAR RASYID
5. LAURENZUS KADEPA
6. JANUARIUS L DOUW
7. KUSMANTO,SH

2. KOMISI II (BIDANG EKONOMI)

KETUA : DEER TABUNI,SE,M.Si

WAKIL KETUA : MADAI KOMBO

SEKRETARIS : Drs. JHON IBO,MM

ANGGOTA : 1. MUSTAKIM HR,SE,SH
2. JUS JEFRI KAUNANG
3. PENDIS ENUMBI,SE
4. ANTHON H NORIWARI
5. NIKIUS BUGIANGGE
6. WILHELMUS PIGAY
7. TAMI GURIK

3. KOMISI III (BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH)

KETUA : CAROLUS KIA KELEN BOLI,SE,MM

WAKIL KETUA : AGUS KOGOYA
SEKRETARIS : KRISTHINA R.I.LULUPORO,S.IP
ANGGOTA : 1. FRANGKY ISMAIL FONATABA
 2. DENIUS KULUA,S.Sos
 3. HERMAN YOGOBI
 4. JAN L AJOMI,S.Sos
 5. RADIUS SIMBOLON,SE,MBA
 6. HERLI BEATRIX M. MONIM,SE
 7. Drs. M. NAWAWI
 8. Ir. H. RUSTAM SARU,MM

4. KOMISI IV (BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SDA)

KETUA : BOY MARKUS DAWIR
WAKIL KETUA : CHRIS RISAMASU
SEKRETARIS : SINUT BUSUP,SE,M.Si
ANGGOTA : 1. YARIUS BALINGGA,SE
 2. THOMAS SONDEGAU,ST
 3. LAZARUS SIEP,S.IP
 4. DEKI NAWIPA,SE
 5. YAN P. MANDENAS,S.Sos,M.Si
 6. STEFANUS KAISEPO
 7. ORGENES KAWAY,S.Th

5. KOMISI V (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA)

KETUA : YAKOBA LOKBERE,SE,SH,M.KP
WAKIL KETUA : NIOLUEN KOTOUKI
SEKRETARIS : NASON UTTY
ANGGOTA : 1. JHONY BANUA ROUW,SE
 2. MARIA DUWITAU
 3. BOBIRUS YIKWA,S.Pd,M.Si
 4. IGNASIUS W MIMIN,S.IP
 5. NATAN BAHABOL,S.Pd
 6. KAMASAN YAKOB KOMBOY
 7. GERSON SOMA,S.Th

Seiring dengan adanya usulan pergantian Anggota Fraksi – Fraksi DPRP pada Alat – Alat Kelengkapan DPRP, maka berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRP Nomor : 02 /PIM-DPRP/2016 Tanggal 25 Februari 2016 tentang Perubahan

Komposisi Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi DPRP masa jabatan 2014 – 2019. Adapun Komposisi susunan Pimpinan dan Anggota Komisi – Komisi DPRP Masa Jabatan 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

1. KOMISI I (BIDANG PEMERINTAHAN)

KETUA : ELVIS TABUNI,SE
WAKIL KETUA : ORGENE WANIMBO
SEKRETARIS : MATHEA MAMEYAO,S.Sos
ANGGOTA :
1. RUBEN MAGAI,S.IP
2. EMUS M GWIJANGGE
3. TAN WIE LONG
4. WILHELMUS PIGAY
5. LAURENZUS KADEPA
6. JANUARIUS L DOUW
7. KUSMANTO,SH

2. KOMISI II (BIDANG EKONOMI)

KETUA : DEER TABUNI,SE,M.Si
WAKIL KETUA : MADAI KOMBO
SEKRETARIS : Drs. JHON IBO,MM
ANGGOTA :
1. MUSTAKIM HR,SE,SH
2. JUS JEFRI KAUNANG
3. PENDIS ENUMBI,SE
4. ANTHON H NORIWARI
5. NIKIUS BUGIANGGE
6. H.SYAMSUNAR RASYID
7. TAMI GURIK

3. KOMISI III (BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH)

KETUA : CAROLUS KIA KELEN BOLI,SE,MM
WAKIL KETUA : AGUS KOGOYA

SEKRETARIS : KRISTHINA R.I.LULUPORO,S.IP
ANGGOTA : 1. FRANGKY ISMAIL FONATABA
 2. DENIUS KULUA,S.Sos
 3. HERMAN YOGOBI
 4. JAN L AJOMI,S.Sos
 5. RADIUS SIMBOLON,SE,MBA
 6. HERLIN BEATRIX M. MONIM,SE
 7. Drs. M. NAWAWI

4. KOMISI IV (BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SDA)

KETUA : YARIUS BALINGGA,SE
WAKIL KETUA : CHRIS RISAMASU
SEKRETARIS : SINUT BUSUP,SE,M.Si
ANGGOTA : 1. THOMAS SONDEGAU,ST
 2. LAZARUS SIEP,S.IP
 3. DEKI NAWIPA,SE
 4. YAN P. MANDENAS,S.Sos,M.Si
 5. STEFANUS KAISEPO
 6. ORGENES KAWAY,S.Th

5. KOMISI V (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA)

KETUA : YAKOBA LOKBERE,SE,SH,M.KP
WAKIL KETUA : NIOLUEN KOTOUKI
SEKRETARIS : NASON UTTY
ANGGOTA : 1. JHONY BANUA ROUW,SE
 2. MARIA DUWITAU
 3. BOBIRUS YIKWA,S.Pd,M.Si
 4. IGNASIUS W MIMIN,S.IP
 5. NATAN BAHABOL,S.Pd
 6. KAMASAN YAKOB KOMBOY
 7. GERSON SOMA,S.Th

BADAN MUSYAWARAH DPR PAPUA

Badan Musyawarah DPRP merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap. Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRP berdasarkan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 02/DPRP/2014 Tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penetapan Susunan komposisi Pimpinan dan keanggotaan Badan Musyawarah DPR Papua Masa Jabatan 2014 – 2019. Adapun Komposisi susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRP Masa Jabatan 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

KETUA : YUNUS WONDA,SH,MH
WAKIL KETUA : EDOARDUS KAIZE,SS
WAKIL KETUA : FERNANDO.A.Y. TINASL,BA
WAKIL KETUA : NY. YANINI,SH
SEKRETARIS : SEKRETARIS DPRP (BUKAN ANGGOTA)
ANGGOTA : 1. RUBEN MAGAI,S.IP
 2. ORGENES WANIMBO
 3. PENDIS ENUMBI
 4. YARIUS BALINGGA,SE
 5. MARIA DUWITAU
 6. FRANKY ISAMIL FONATABA
 7. BOY MASKUS DAWIR
 8. ANTHON H. NORIWARI
 9. YAKOBA LOKBERE,SE,SH,M.KP
 10. IGNASIUS W MIMIN,S.IP
 11. JAN L AJOMI,S.Sos
 12. RADIUS SIMBOLON,SE,MBA
 13. Drs. JHON IBO,MM
 14. YAN P MANDENAS,S.Sos,M.Si
 15. NIKIUS BUGIANGE
 16. GERSON SOMA,S.Th
 17. WILHWLMUS PIGAY
 18. H.SYAMSUNAR RASYID
 19. AGUS KOGOYA,S.IP,M.Si
 20. JANUARIUS L.DOUW,SH
 21. SINUT BUSUP,SE,M.Si
 22. NIOLUEN KOTOUKI
 23. KUSMANTO,SH

Seiring dengan adanya usulan pergantian Anggota Fraksi – Fraksi DPRP pada Alat – Alat Kelengkapan DPRP, maka berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRP Nomor : 02 /PIM-DPRP/2016 Tanggal 25 Februari 2016 tentang Perubahan

Komposisi Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi DPRP masa jabatan 2014 – 2019. Adapun Komposisi susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRP Masa Jabatan 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

KETUA : YUNUS WONDA,SH,MH
WAKIL KETUA : EDOARDUS KAIZE,SS
WAKIL KETUA : FERNANDO.A.Y. TINAL,BA
WAKIL KETUA : NY. YANINI,SH
SEKRETARIS : SEKRETARIS DPRP (BUKAN ANGGOTA)
ANGGOTA : 1. RUBEN MAGAI,S.IP
 2. ORGENES WANIMBO
 3. PENDIS ENUMBI,SE
 4. YARIUS BALINGGA,SE
 5. MARIA DUWITAU
 6. FRANKY ISAMIL FONATABA
 7. BOY MASKUS DAWIR
 8. ANTHON H. NORIWARI
 9. YAKOBA LOKBERE,SE,SH,M.KP
 10. IGNASIUS W MIMIN,S.IP
 11. JAN L AJOMI,S.Sos
 12. RADIUS SIMBOLON,SE,MBA
 13. Drs. JHON IBO,MM
 14. YAN P MANDENAS,S.Sos,M.Si
 15. KAMASAN YAKOB KOMBOY
 16. GERSON SOMA,S.Th
 17. WILHWLMUS PIGAY
 18. H.SYAMSUNAR RASYID
 19. AGUS KOGOYA,S.IP,M.Si
 20. JANUARIUS L.DOUW,SH
 21. SINUT BUSUP,SE,M.Si
 22. NIOLUEN KOTOUKI
 23. KUSMANTO,SH

BADAN ANGGARAN DPR PAPUA

Badan Anggaran DPRP merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap. Komposisi Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR Papua dibentuk

berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 02 / DPRP/2014 Tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penetapan Susunan komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPR Papua masa jabatan 2014 -2019. Adapun Komposisi susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRP Masa Jabatan 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

KETUA: YUNUS WONDA,SH,MH

WAKIL KETUA : FERNANDO.A.Y. TINAL,BA

WAKIL KETUA : EDOARDUS KAIZE,SS

WAKIL KETUA : NY. YANINI,SH

SEKRETARIS : JULIANA J WAROMI,SE,M.Si (BUKAN ANGGOTA)

ANGGOTA : 1. CAROLUS KIA KELEN BOLI,SE,MM

2. DENIUS KULUA,S.Sos

3. EMUS M.GWIJANGGE

4. MUSTAKIM HR,SE,SH

5. THOMAS SONDEGAU,ST

6. JHONY BANUA ROUW,SE

7. BORIUS YIKWA,S.Pd,M.Si

8. MATHEA MAMEYAO,S.Sos

9. HERMAN YOGOBI

10. KRISTHINA R.I.LULUPORO,S.IP

11. IGNASIUS W MIMIN,S.IP

12. JAN L AJOMI,S.Sos

13. RADIUS SIMBOLON,SE,M.BA

14. ELVIS TABUNI,SE

15. YAN P MANDENAS,S.Sos,M.Si

16. HERLIN BEATRIX M. MONIM,SE

17. KAMASAN YAKOB KOMBOY

18. Drs. M. NAWAWI

19. STEVANUS KAISEPO

20. NASON UTTI,SE

21. ORGENES KAWAY,S.Th

22. MADAI KOMBO

23. Ir.RUSTAM SARU,MM

24. TAMI GURIK,SE

Seiring dengan adanya usulan pergantian Anggota Fraksi – Fraksi DPRP pada Alat – Alat Kelengkapan DPRP, maka berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRP Nomor : 02 /PIM-DPRP/2016 Tanggal 25 Februari 2016 tentang Perubahan Komposisi Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah, Badan

Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi DPRP masa jabatan 2014 – 2019. Adapun Komposisi susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRP Masa Jabatan 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

KETUA	: YUNUS WONDA,SH,MH
WAKIL KETUA	: FERNANDO.A.Y. TINAL,BA
WAKIL KETUA	: EDOARDUS KAIZE,SS
WAKIL KETUA	: NY. YANINI,SH
SEKRETARIS	: JULIANA J WAROMI,SE,M.Si (BUKAN ANGGOTA)
ANGGOTA	: 1. CAROLUS KIA KELEN BOLI,SE,MM 2. DENIUS KULUA,S.Sos 3. EMUS M.GWIJANGGE 4. MUSTAKIM HR,SE,SH 5. THOMAS SONDEGAU,ST 6. JHONY BANUA ROUW,SE 7. BORIUS YIKWA,S.Pd,M.Si 8. MATHEA MAMEYAO,S.Sos 9. HERMAN YOGOBI 10. KRISTHINA R.I.LULUPORO,S.IP 11. IGNASIUS W MIMIN,S.IP 12. JAN L AJOMI,S.Sos 13. ELVIS TABUNI,SE 14. YAN P MANDENAS,S.Sos,M.Si 15. HERLIN BEATRIX M. MONIM,SE 16. KAMASAN YAKOB KOMBOY 17. Drs. M. NAWAWI 18. STEVANUS KAISEPO 19. NASON UTTI,SE 20. ORGENES KAWAY,S.Th 21. MADAI KOMBO 22. Ir.RUSTAM SARU,MM 23. TAMI GURIK,SE

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DPRP merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRP. Komposisi susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan

Daerah Provinsi DPRP dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 02 /DPRP/2014 Tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penetapan Komposisi Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DPRP masa jabatan 2014 – 2019. Adapun Komposisi susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DPRP Masa Jabatan 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

KETUA : JAN L.AJOMI,S.Sos
WAKIL KETUA : RUBEN MAGAI,S.IP
SEKRETARIS : JULIANA J.WAROMI,SE,M.Si (BUKAN ANGGOTA)
ANGGOTA : 1. PENDIS ENUMBI
 2. EMUS M. GWIJANGGE
 3. MATHEA MAMEYAO,S.Sos
 4. NATAN PAHABOL,SE,M.Si
 5. YAN P.MANDENAS,S.Sos,M.Si
 6. HERLIN BEATRIX MONIM,SE
 7. NASON UTTI,SE
 8. SINUT BUSUP,SE,M.Si

BADAN KEHORMATAN DPR PAPUA

Badan Kehormatan DPRP merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap. Komposisi susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPR Papua berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor / DPRP/ 2014 Tanggal 19 Desember 2014 tentang Penetapan Komposisi Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPR Papua, adalah sebagai berikut :

KETUA : MARIA DUWITAU
WAKIL KETUA : DECKY NAWIPA
ANGGOTA : 1. LAZARUS SIEP,S.IP
 2. DEERD TABUNI,SE,M.Si
 3. HERLIN BEATRIX M.MONIM,SE

PRODUK HUKUM DPR PAPUA

Produk Hukum DPR Papua meliputi, Peraturan Daerah, Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan Dewan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Tata Tertib DPR Papua Nomor 02 / DPRP / 2010, Peraturan

Daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua bersama-sama dengan Gubernur Provinsi Papua. Sedangkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua dan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua. Rancangan Perdasi dan Perdasus berasal dari Gubernur atau juga dapat berupa usul inisiatif dari DPR Papua. Prosedur dan mekanisme pembahasan hingga penetapan Rancangan Perdasi dan Perdasus menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perdasi dan Perdasus) yang telah mendapatkan pertimbangan MRP dan memperoleh persetujuan DPR Papua serta dinyatakan sah dan berlaku sejak diundangkan dilembaran daerah. Berikut Produk Hukum DPR Papua berupa Rancangan Perdasi dan Rancangan Perdasus, Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan Dewan yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripuran DPRP Periode 2001 s.d 2013 yang berkaitan dengan implementasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, sebagai berikut :

A. PERATURAN DAERAH : RANCANGAN PERDASI DAN PERDASUS

NO.	KETERANGAN TAHUN	PERDASI/PERDASUS
1	Tahun 2001	Raperdasi Tentang Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya.
2	Tahun 2001	Raperdasi Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Irian Jaya.
3	Tahun 2001	Raperdasi Tentang Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 1999/2000.
4	Tahun 2002	Raperdasi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 2001.
5	Tahun 2002	Raperdasi Tentang Perhitungan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2001.
6	Tahun 2003	Raperdasi Tentang Perhitungan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 2002
7	Tahun 2003	Raperdasi Tentang Perhitungan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2002.
8	Tahun 2004	Raperdasi Tentang Pemberian Biaya Pemungutan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Penunjang.
9	Tahun 2004	Raperdasi Tentang Pembagian Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
10	Tahun 2004	Raperdasi Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11	Tahun 2004	Raperdasi Tentang Arah dan Kebijakan Umum Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah APBD Tahun Anggaran 2004.
12	Tahun 2004	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004.

NO.	KETERANGAN TAHUN	PERDASI/PERDASUS
13	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2005.
14	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004.

15	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Kedudukan Protoker dan Keuangan Pimpinan dangan Anggota DPRD Provinsi Papua.
16	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Peresmian Nomenklatur Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
17	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
18	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua.
19	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua.
20	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004 dan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua tentang Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2000 – 2005.
21	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2005
22	Tahun 2005	Raperdasi Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP
23	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Pembanguna Pendidikan di Tanah Papua
24	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies
25	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Sekretariat DPR Papua.
26	Tahun 2006	Raperdasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemabag Teknis Provinsi Papua.
27	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Provinsi Papua
28	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pendirian PT. Papua Gracia Airlines.
29	Tahun 2006	Raperdasi Tentang APBD Provinsi Papua Tahun 2006
30	Tahun 2006	Raperdasi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua / Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005
31	Tahun 2006	Raperdasi Tentang RPJM Provinsi Papua
32	Tahun 2007	Raperdasus Tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus
33	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan MRP terhadap Raperdasus.
34	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua / Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006.

NO.	KETERANGAN TAHUN	PERDASI/PERDASUS
35	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRP.
36	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

37	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
38	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007.
39	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008.
40	Tahun 2007	Raperdasi Tentang Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Papua.
41	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007.
42	Tahun 2008	Perdasus Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP
43	Tahun 2008	Perdasus Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP
44	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota MRP
45	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah
46	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Restribusi Jasa Ketatawirausahaan
47	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
48	Tahun 2008	Raperdasi Pelestarian Lingkungan Hidup
49	Tahun 2008	Raperdasi tentang Penataan Pemukiman
50	Tahun 2008	Raperdasi Pengujian Mutu Material Bahan Bangunan
51	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Pertambangan Rakyat Daerah
52	Tahun 2008	Raperdasi tentang Pembangunan Kependudukan
53	Tahun 2008	Raperdasi tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua
54	Tahun 2008	Raperdasi tentang Jasa Konstruksi Bangunan
55	Tahun 2008	Raperdasus tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan
56	Tahun 2008	Raperdasus Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua
57	Tahun 2008	Raperdasus tentang Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua
58.	Tahun 2008	Raperdasus tentang Pertambangan Rakyat Daerah
59.	Tahun 2008	Raperdasus Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
60.	Tahun 2008	Raperdasus tentang Pembangunan Hutan Yang Berkelanjutan Di Papua
61.	Tahun 2008	Raperdasi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Papua dan Staf Ahli Gubernur
62.	Tahun 2008	Raperdasi tentang Gizi Penduduk
63.	Tahun 2008	Raperdasus tentang Pembangunan Hutan Yang Berkelanjutan Di Papua
64.	Tahun 2008	Raperdasi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Papua dan Staf Ahli Gubernur
65.	Tahun 2008	Raperdasi tentang Gizi Penduduk
66.	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Susunan Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua
67.	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
68.	Tahun 2008	Raperdasus tentang Pertambangan Umum
69.		

	Tahun 2008	Rapedasus Tentang Peradilan Adat Papua
70.	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Penanggulangan HIV/AIDS
71.	Tahun 2008	Raperdasi Tentang Persetujuan Perusahaan Induk Milik Daerah "Papua Sejahtera" (Holding Company)
72.	Tahun 2009	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009.
73.	Tahun 2009	Raperdasi Tentang Laporang Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Papua dan Perhitungan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008.
74.	Tahun 2009	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010.
75.	Tahun 2009	Raperdasi Tentang Persetujuan Penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
76.	Tahun 2010	Raperdasi Tentang Pelayanan Kesehatan
77.	Tahun 2010	Raperdasi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010
78.	Tahun 2010	Raperdasi Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
79.	Tahun 2010	Raperdasi Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
80.	Tahun 2010	Raperdasi Tentang Pembentukan Rancangan Perdasi dan Rancangan Perdasus.
81.	Tahun 2011	Raperdasi Tentang LKPJ Akhir Tahun Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 – 2011.
82.	Tahun 2011	Raperdasi Tentang LKPJ Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010
83.	Tahun 2011	Raperdasi Tentang Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2010
84.	Tahun 2011	Raperdasus Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua
85.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012.
86.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang LKPJ Gubernur Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011
87.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011.
88.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012.
89.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Ketenagakerjaan
90.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (revisi Perda).
91.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
92.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
93.	Tahun 2012	Raperdasi Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua.
94	Tahun 2012	Raperdasus Tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil.

B. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NO.	NOMOR	TENTANG	TANGAL/TAHUN
-----	-------	---------	--------------

1	13/DPRD/2001	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Irian Jaya Tahun Anggaran 2001 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Irian Jaya	6 Desember 2001
2	2/DPRD/2002	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2002 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua	26 April 2002
3	6/DPRD/2002	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2001 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua	12 Agustus 2002
4	7/DPRD/2002	Penetapan Dan Pemberian Persetujuan Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun 2001	12 Agustus 2002
5	07/DPRD/2003	Usul Pencatatan Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua	1 Agustus 2003
6	03/DPRD/2003	Pernyataan Sikap Penolakan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Provinsi Papua	25 Juni 2003
7	08/DPRD/2003	Penolakan atas Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 dan Nomor 160 a/KMK.02/2003 Tentang Penyaluran Dana Penerimaan Khusus dalam Rangka Pelaksanaan Otonom Khusus Provinsi Papua Tanggal 29 April 2003	1 Agustus 2003
8	02/DPRD/2004	Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004	19 Oktober 2004
9	03/DPRD/2004	Pembentukan Panitia Teknis pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Hasil Masa Jabatan 2004-2009	19 Oktober 2004
10	04/DPRD/2004	Tata cara pencalonan dan pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Periode 2004-2009	22 Oktober 2004
11	05/DPRD/2004	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2004 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua	4 Maret 2004
12	18/DPRP/2005	Pernyataan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Papua mengenai penolakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat	16 Nopember 2005
13	02/DPRP/2006	Tentang pembagian pengelolahan dalam rangka otonom khusus	19 Mei 2006
14	05/DPRP/2006	Pemakaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Irian Jaya Barat atau Nama Lain	17 Februari 2006
15	06/DPRP/2006	Persetujuan peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi	24 Mei 2006
16	09/DPRP/2006	Persetujuan rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua	23 Nopember 2006

17	10/DPRP/2006	Persetujuan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2005.	23 Nopember 2006
----	--------------	--	------------------

18	12/DPRP/2006	Persetujuan Terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua	23 Nopember 2006
19	13/DPRP/2006	Penetapan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua	6 Desember 2006
20	14/DPRP/2006	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua	6 Desember 2006
21	15/DPRP/2006	Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Papua	7 Desember 2006
22	16/DPRP/2006	Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Papua	8 Desember 2006
23	17/DPRP/2006	Penetapan dan Anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua	8 Desember 2006
24	18/DPRP/2006	Pernyataan pendapat DPRP mengenai penolakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Penetapan pimpinan dan anggota panitia legislasi DPRP	16 Feb 2006 8 Des 2006
25	03/DPRP/2007	Persetujuan terhadap Rancangan peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pembagian dan Pengelolaan Penerima dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua	2 Februari 2007
26	04/DPRP/2007	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap Rancangan Peraturan Dearah Khusus untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua	2 Februari 2007
27	05/DPRP/2007	Persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006	10 Agustus 2007
28	06/DPRP/2007	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua	10 Agustus 2007
29	07/DPRP/2007	Persetujuan Terhadap Rancangan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua	10 Agustus 2007
30	08/DPRP/2007	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	10 Agustus 2007
31	10/DPRP/2007	Persetujuan Terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Provinsi Papua	8 Oktober 2007
32	11/DPRP/2007	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008	8 Oktober 2007
33	19/DPRP/2007	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007	2 Maret 2007
34	02/DPRP/2008	Persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007	26 Sept 2008
35	03/DPRP/2008	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua	26 September 2008
36	04/DPRP/2008	Penetapan Program Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2007/2008	18 Nopember 2008
37	05/DPRP/2008		21 Nopember 2008

		Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2008	
38	08/DPRP/2008	Persetujuan terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan satu Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua	11 Desember 2008
39	09/DPRP/2008	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penanggulangan HIV dan AIDS untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2008	18 Desember 2008
40	10/DPRP/2008	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2008	19 Desember 2008
41	01/DPRP/2009	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua	17 Juli 2009
42	O2 DPRP/2009	Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun 2008	17 Juli 2009
43	03/DPRP/2009	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2009	14 Juli 2009
44	04/DPRP/2009	Persetujuan rancangan Peraturan Daerah terhadap perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2009	17 Agustus 2009
45	05/DPRP/2009	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat	8 Oktober 2009
46	06/DPRP/2009	Persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang pembentukan dana cadangan Pemerintah Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua.	8 Oktober 2009
47	07/DPRP/2009	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pelayanan Kesehatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi papua	8 Oktober 2009
48	08/DPRP/2009	Penetapan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi-fraksi DPR Papua Masa jabatan 2009-2014	13 Oktober 2009
49	09/DPRP/2009	Penetapan Nama Calon Pimpinan Definitif DPR Papua Masa Jabatan 2009 - 2014	14 Oktober 2009
50	10/DPRP/2009	Persetujuan Rancangan Peraturan DPR Papua tentang Tata Tertib untuk ditetapkan menjadi peraturan DPR Papua	7 Desember 2009
51	11/DPRP/2009	Penetapan pimpinan dan Anggota komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Papua	11 Desember 2009
52	12/DPRP/2009	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat papua	12 Desember 2009
53	13/DPRP/2009	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat papua	11 Desember 2009
54	14/DPRP/2009	Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mamberamo Hulu di Provinsi papua.	11 November 2009
55	15/DPRP/2009	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi	11 November 2009

		Papua Tahun 2010. Persetujuan pembentukan Kabupaten Yahukimo Utara di Provinsi Papua	
56	01/DPRP/2010	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua	4 Februari 2010
57	02/DPRP/2010	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua	4 Februari 2010
58	03/DPRP/2010	Persetujuan pembentukan Kabupaten Pulau Numfor di Provinsi Papua	29 Maret 2010
59	04/DPRP/2010	Persetujuan pembentukan Kabupaten Grime Nawa di Provinsi Papua	25 Juni 2010
60	05/DPRP/2010	Persetujuan Distrik Yapsi sebagai Ibu Kota Kabupaten Grime Nawa	25 Juni 2010
61	06/DPRP/2010	Perubahan Keputusan DPRP Nomor : 039/DPRP/Tahun 2007 Tentang pemberian dana dari APBD Provinsi Papua untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama bagi Calon Kabupaten Grime nawa.	25 Juni 2010
62	07/DPRP/2010	Persetujuan Peta Wilayah Kab.Grime Nawa dan cakupan wilayah.	25 Juni 2010
63	08/DPRP/2010	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan DPR Papua tentang Perubahan atas Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan.	13 juli 2010
64	09/DPRP/2010	Persetujuan Penetapan Kode Etik DPR Papua	13 juli 2010
65	10/DPRP/2010	Persetujuan Penetapan Tata Beracara DPR Papua	13 juli 2010
66	11/DPRP/2010	Persetujuan Penetapan Komposisi Anggota Badan Legislasi DPRP	13 juli 2010
67	12/DPRP/2010	Laporan LKPJ Gubernur Provinsi Papua Tahun 2009	28 juli 2010
68	13/DPRP/2010	Persetujuan Raperda Provinsi Papua Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009 untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Papua Tahun 2010	28 juli 2010
69	14/DPRP/2010	Persetujuan Terhadap Raperda Provinsi Papua tentang APBD Tahun 2011 untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Papua Tahun 2010	25 agustus 2010
70	15/DPRP/2010	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2010	24 September 2010
71	16/DPRP/2010	Persetujuan atas Judicial Review terhadap Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.	29 Oktober 2010
72	17/DPRP/2010	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua tentang Pemilihan Anggota MRP untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua.	
73	18/DPRP/2010	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang pelayanan kesehatan untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua.	1 Desember 2010
74	19/DPRP/2010	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua.	1 Desember 2010
75	20/DPRP/2010	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi	1 Desember 2010

		Papua untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua.	
76	21/DPRP/2010	Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan Perdasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua.	1 Desember 2010
77	903/KEP-DPRP-1/2011	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap laporan keterangan Pertanggung Jawaban akhir masa jabatan kepada Daerah Provinsi Papua	21 Juli 2011
78	903/KEP-DPRP-2/2011	Rekomendasi terhadap laporan keterangan Pertanggung Jawaban kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2010	21 Juli 2011
79	903/KEP-DPRP-3/2011	Persetujuan atas rancangan peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi Papua.	21 juli 2011
80	188.3/KEP-DPRP-4/2011	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah	21 Juli 2011
81	064/KEP-DPRP-5/2011	Persetujuan dan Penetapan terhadap Pembentukan 8 (Delapan) Panitia khusus Dewan	21 Juli 2011
82	064/KEP-DPRP-6/2011	Pembentukan Panitia khusus LHP DPR Papua atas APBD Tahun Anggaran 2010	21 Juli 2011
83	188.3/KEP-DPRP-7/2011	Persetujuan Hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap Rancangan Peraturan Daerah khusus tentang tata cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.	24 Agustus 2011
84	903/KEP-DPRP-8/2011	Persetujuan atas Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011	
85	064/KEP-DPRP-9/2011	Penetapan Panitia khusus tindak Lanjut LHP BPK RI atas APBD Tahun Anggaran 2011	21 Okt 2011
86	188.3/KEP-DPRP-10/2011	Persetujuan DPRP terhadap Rancangan Perdasus tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk ditetapkan menjadi Perdasus.	
87	903/DPRP-1/2012	Persetujuan DPRP Terhadap RAPBD Tahun 2012	17 Februari 2012
88	188.3/DPRP-2/2012	Persetujuan DPRP Terhadap Raperdasai tentang pernyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua kepada PT.Rakyat Papua Sejahtera (Holding Compony) untuk ditetapkan menjadi Perdasi Papua.	17 Februari 2012
89	188.3/DPRP-3/2012	Persetujuan DPRP terhadap Raperdasai tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk ditetapkan menjadi Perdasus	17 Februari 2012
90	188.3/DPRP-4/2012	Persetujuan DPRP terhadap Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2012	17 Februari 2012
91	161/DPRP-5/2012	Penetapan Pendistribusian Anggota Franksi DPRP ke komisi-komisi	31 Mei 2012
92	161/DPRP-6/2012	Jadwal Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua	31 Mei 2012
93	161/DPRP-7/2012	Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPR Papua	11 Juli 2012
94	161/DPRP-8/2012	Penetapan Anggota BK DPRP	12 Juli 2012
95	161/DPRP-9/2012	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRP	12 Juli 2012
96	161/DPRP-10/2012	Penetapan Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRP	12 Juli 2012
97	161/DPRP-11/2012	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi	12 Juli 2012

		DPRP	
98	161/DPRP-12/2012	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRP	12 Juli 2012
99	903/DPRP-13/2012	Rekomendasi Terhadap laporan keterangan pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011	5 September 2012
100	903/DPR-14/2012	Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua.	5 September 2012
101	903/DPRP-15/2012	Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012	5 September 2012
102	161/DPRP-16/2012	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap Pembentukan 2 panitia khusus DPR Papua Tahun 2012	5 September 2012
103	17/DPRP/2012	Persetujuan atas rancangan peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran penetapan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2013	21 Desember 2012
104	18/DPRP/2012	Program legislasi Daerah (Prolegda) 2013	21 Des 2012
105	19/DPRP/2012	Persetujuan DPRP terhadap 6 (enam) Raperdasi dan 1 (satu) Raperdasus untuk ditetapkan menjadi Perdasi/Perdasus	21 Des 2012
106	20/DPRP/2012	Rekomendasi DPRP terhadap 21 Daerah Otonom Baru terdiri dari 19 Kabupaten dan 2 kota	21 Des 2012

C. KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN

NO.	NOMOR	TENTANG	TANGGAL/TAHUN
1	03/PIM-DPRD/2001	Pemberian Persetujuan Terhadap Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi papua dalam Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri	12 April 2001
2	16/PIM-DPRP/2002	Pembentukan Peradilan HAM dan Perwakilan Komnas HAM Papua	28 Mei 2002
3	17/PIM-DPRD/2002	Dialog Nasional	28 Mei 2002
4	15/PIM-DPRD/2002	Papua sebagai Sona Damai	28 Mei 2002
5	18/PIM-DPRD/2002	Hak Hidup Rakyat Papua	28 Mei 2002
6	02/PIM-DPRD/2004	Penugasan Kepada Pimpinan DPRD dan Komisi yang berkompeten untuk mengajukan Hak Uji Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap UUD Negara RI 1945 di Mahkamah Konstitusi dan Upaya Hukum lainnya terhadap produk peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001	26 Januari 2004
7	07/PIM-DPRD/2005	Persetujuan Pemakaran/Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua	4 Februari 2005
8	19/PIM-DPRD/2005	Pembentukan Panitia Khusus Otonomi Khusus Provinsi Papua	5 April 2005
9	20/PIM-DPRD/2005	Pembentukan Panitia Khusus Perdasi dan Perdasus	5 April 2005
10	21/PIM-DPRD/2005	Pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Kepala Daerah	5 April 2005
11	25/PIM-DPRD/2005	Penunjukan Tenaga Ahli Panitia Khusus Perdasi Perdasus Dewan Perwakilan Rakyat Papua	12 Juni 2005
12	72/PIM-DPRD/2005	Pembentukan TIM Penyusun Peraturan Pemerintah Tentang Pemekaran Irian Jaya Barat dan Peraturan Pemerintah Tentang Kesatuan Wilayah Perekonomican Papua	8 Desember 2005
13	73/PIM-DPRD/2005	Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor : 1/DPRD/2005 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi	8 Desember 2005

		Papua	
14	8/PIM-DPRP/2006	Pembentukan tim ahli Hukum penyelesaian kasus PT. Freeport Indo	24 April 2006
15	21/PIM-DPRP/2006	Pembentukan panitia khusus Pemilihan Kepala Daerah	5 April 2006
16	22/PIM-DPRP/2006	Pembentukan tim ahli penyusunan Perdasus pembentukan dana Otsus	6 Nov 2006
17	1/PIM-DPRP/2007	Tentang pembentukan tim Pokja penyusunan Jadwal Tahun Anggaran 2007	15 Jan 2007
18	5/PIM-DPRP/2007	Tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007	
19	7/PIM-DPRP/2007	Tentang Persetujuan Penyempurnaan hasil Evaluasi RAPBD Tahun Anggaran 2007	
20	15/PIM-DPRP/2008	Tentang Pembentukan Pansy Perhit APBD dan Lap. Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2007	16 Sept 2008
21	16/PIM-DPRP/2008	Pembentukan panitia khusus rencana kerja DPRP Tahun Anggaran 2008	1 Sept 2008
22	17/PIM-DPRP/2008	Penetapan Jadwal Rapat Paripurna DPRP Terhadap Pembahasan LKPJ Gubernur Provinsi Papua Tahun 2007 Perhit APBD Tahun anggaran 2007 dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan penetapan Raperdasi/Raperdasus serta RAPBD Tahun Anggaran 2009	10 Sept 2008
23	20/PIM-DPRP/2008	Pembentukan Panitia khusus perhit APBD Tahun Anggaran 2007 dalam lap. Keterangan Pertanggung Jawaban tahun 2007	16 Sept 2008
24	29/PIM-DPRP/2008	Pembentukan IV Jadwal Rapat Paripurna Masa Sidang II dalam rangka Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 dan pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2009	17 Nov 2008
25	01/PIM-DPRP/2009	Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-23 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.	21 Januari 2009
26	03/PIM-DPRP/2009	Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua Nomor 22/PIM-DPRP/2008 tanggal 23 September 2009 tentang Pembentukan Panitia khusus Pembangunan pasar tradisional DPR Papua.	15 Mei 2009
27	04/PIM-DPRP/2009	Pengesahan Personil Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya	17 September 2009
28	05/PIM-DPRP/2009	Persetujuan Pemekaran /Pembentukan dan penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Provinsi Papua Barat Daya Dalam Wilayah Daerah Otonom Khusus dalam Rangka pelaksanaan UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua	15 Juni 2009
29	06/PIM-DPRP/2009	Pemberian bantuan dana dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama bagi Provinsi Papua Barat Daya.	
30	14/PIM-DPRP/2009	Jadwal Perubahan Rapat Paripurna masa Sidang ke II DPR Papua dalam rangka Pembahasan dan	15 September 2009

		Penetapan rancangan Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggota 2009	
31	17/PIM-DPRP/2009	Jadwal perubahan Rapat Paripurna Masa Sidang ke II DPR Papua dalam rangka persetujuan atas rencana penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada pemerintah Propinsi Papua Barat	
32	18/PIM-DPRP/2009	Jadwal Perubahan Rapat Paripurna Masa Sidang ke II DPR Papua dalam rangka persetujuan atas rencana penyerahan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Raperdasi Pembangunan kesehatan dan Raperdasi Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua.	
33	19/PIM-DPRP/2009	Jadwal Perubahan Rapat Paripurna Masa Sidang ke II DPR Papua dalam Rangka persetujuan atas Rencana Penyerahan asset Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Raperdasi Pembangunan Kesehatan dan Raperdasi Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua.	
34	26/PIM-DPRP/2009	Pembentukan Tim Investigasi Masalah Penembakan di PT.Freeport Indonesia Kabupaten Mimika dan Tambang Ilegal diKabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai.	
	02/PIM-DPRP/2010	Pembentukan Panitia Khusus Pemilukada	27 April 2010
35	05/PIM-DPRP/2010	Pembentukan Tim Penyusun Perdasus tentang perubahan Perdasus Provinsi Papua No.4 Tahun 2008 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua	11 Juni 2010
36	06/PIM-DPRP/2010	Penetapan Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 Penyampaian laporan keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua tahun 2009 Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010.	13 Juli 2010
37	07/PIM-DPRP/2010 07/PIM-DPRP/2010	Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua N0.06/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I dalam rangka pembahasan RAPBD tahun Anggaran 2011 Penyampaian laporan keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Papua Tahun 2009. Raperda tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010	
38	08/PIM-DPRP/2010	Perubahan kedua atas keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.07/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPRP Masa Sidang I tahun 2010	20 Juli 2010
39	09/PIM-DPRP/2010	Perubahan ketiga atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.08/pim-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPRP Masa Sidang I Tahun 2010	
40	10/PIM-DPRP/2010	Pembentukan Panitia khusus LHP BPK Republik Indonesia atas APBD Tahun Anggaran 2009	20 Juli 2010
41	11/PIM-DPRP/2010	Perubahan ke-empat atas keputusan Pimpinan DPR Papua No.09/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang Tahun 2010.	
42	12/PIM-DPRP/2010	Perubahan kelima atas keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.11/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I Tahun 2010	
43	13/PIM-DPRP/2010	Pembentukan Panitia khusus Pengawal Pasca Gempa diKab. Kepulauan Yapen Kab. Waropen dan	

		Kab Biak Provinsi Papua.	
44	14/PIM-DPRP/2010	Penetapan Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I tahun 2010 dalam rangka pembahasan Raperda APBD Perubahan tahun Anggaran 2010. Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua	25 Agustus 2010
45	15/PIM-DPRP/2010	Perubahan atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No. 14/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I Tahun 2010 perubahan atas keputusan Pimpinan DPRP No.15/PIM-DPRP/2010 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I Tahun 2010 dalam rangka pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010.	2 September 2010
46	16/PIM-DPRP/2010	Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua no 15/PIM-DPRP/2010 tentang jadwal Rapat rangka Pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 dalam rangka Pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010	20 September 2010
47	17/PIM-DPRP/2010	Perubahan atas keputusan Pimpinan DPR Papua No.16/pim-DPRP/2010 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua Masa Sidang I Tahun 2010 dalam rangka pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010	23 September 2010
48	18/PIM-DPRP/2010	Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Legislasi dan Pembagian Raperdasari Raperdasus dalam rangka Penyempurnaan dan Harmonisasi Raperdasari /Raperdasus Provinsi Papua.	22 Oktober 2010
49	19/PIM-DPRP/2010	Penunjukan Tim Penasehat Hukum dalam proses pelaksanaan Judicial Review di Mahkamah Konsultasi terhadap pasal 7a Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Republik 1945.	29 Oktober 2010
50	20/PIM-DPRP/2010	Penetapan jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam rangka Pembahasan dan penetapan Perdasari/Raperdasus.	30 November 2010
51	21/PIM-DPRP/2010	Penunjukan Tim Kuasa Hukum Dalam proses pelaksanaan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2008 terhadap perubahan atas Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	28 Oktober 2010
52	22/PIM-DPRP/2010	Pembentukan panitia khusus pengawas pemilihan Anggota MRP	29 Okt 2010
53	23/PIM-DPRP/2010	Pembentukan Pansus Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua	10 Des 2010
54	02/PIM-DPRP/2011	Perubahan Keputusan Pimpinan DPRP no.19/PIM-DPRP/2010 tentang pembentukan panitia khusus Judicial Review DPRP	14 Januari 2011
55	10/PIM-DPRP/2011	Perubahan Atas Keputusan pimpinan DPR Papua No.23/PIM-DPRP/2010 tentang pembentukan panitia khusus evaluasi pelaksanaan Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.	6 April 2011
56	12/PIM-DPRP/2011	Penetapan komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia khusus pemilihan kepala Daerah Provinsi Papua	20 Mei 2011

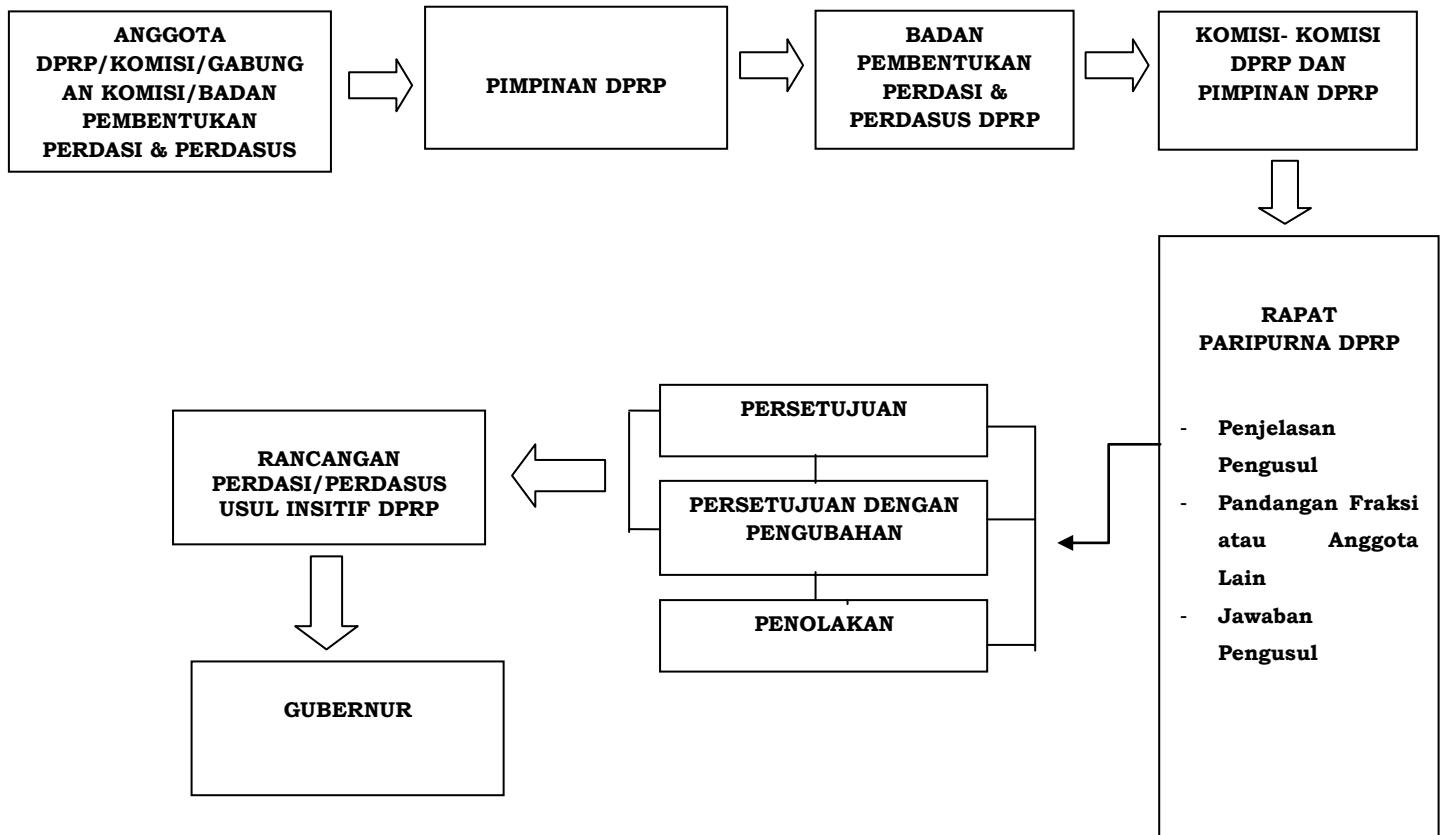
57	13/PIM-DPRP/2011	Penetapan Jadwal Paripurna DPR Papua Masa Sidang I dalam rangka penyampaian laporan akhir masa Jabatan Gubernur periode 2006-2012, UKPJ, APBD tahun anggaran 2011, sejumlah Raperda, Raperdasus KUA, PPAS tahun anggaran 2012	15 Juni 2011
58	14/PIM-DPRP/2011	Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRP Nomor 13/PIM-DPRP/2011 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam rangka Laporan keterangan pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Terhadap APBD Provinsi Papua Tahun 2010, dan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010	23 Juni 2011
59	15/PIM-DRP/2011	Perubahan ke-dua atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 14/PIM-DPRP/2011 tentang jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam Rangka Laporan keterangan pertanggung Jawaban akhir masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua tahun 2006-2011, Laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah terhadap APBD Provinsi Papua tahun 2010, dan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010	27 Juni 2011
60	16/PIM-DPRP/2011	Perubahan ketiga atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 15/PIM-DPRP/2011 tentang Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011 laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah terhadap APBD Provinsi Papua tahun 2010, dan laporan pertanggung jawaban kepala daerah terhadap APBD Provinsi Papua tahun 2010, dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran	13 Juli 2011
61	17/PIM-DPRP/2011	Perubahan Jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka pembahasan : 1. LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2006-2011; 2. LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010; 3. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010; 4. Penetapan Raperdasi/Raperdasus; 5. Pengesahan Alat Kelengkapan Dewan Tidak Tetap (Pansus)	20 Juli 2011
62	064/Kep.PIM-19/2011	Penetapan Kompsesi dan keanggotaan panitia khusus tindak lanjut LHP Bpk RI atas APBD Tahun anggota 2010	18 Agustus 2011
63	064/Kep.PIM-20/2011	Perubahan atas keputusan pimpinan DPRP No.12/PIM-DPRP/2011 tentang panitia khusus pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	02 Agustus 2011
64	135/Kep.PIM-21/2011	Persetujuan pembentukan Calon Kabupaten Yaburu di Provinsi Papua	16 Agustus 2011
65	903/Kep.PIM-23/2011	Pembentukan kelompok kerja (pokja) belanja langsung dan belanja tidak langsung APBD perubahan tahun 2011 dan RAPBD Tahun anggaran 2012 DPRP	14 September 2011
66	903/Kep.PIM-24/2011	Perubahan keputusan pimpinan DPR Paapua Nomor 903/Kep.PIM-23/2011 tentang pembentukan	21 September 2011

		pokja belanja langsung dan belanja tidak langsung APBD tahun anggaran 2012 DPRP.	
67	161/PIM-DPRP-25/2011	Perubahan Badan Legislasi DPRP (tentang Sekwan)	5 Oktober 2011
68	903/PIM-DPRP-27/2011	Jadwal Rapat Paripurna masa Sidang II dalam rangka pembahasan RAPBD perubahan Tahun Anggaran 2011	7 Oktober 2011
69	903/PIM-DPRP-28/2011	Perubahan Jadwal Rapat paripurna tentang pembahasan RAPBD perubahan tahun anggaran 2011	17 Oktober 2011
70	903/PIM-DPRP-29/2011	Perubahan kedua atas jadwal rapat pimpinan tentang pembahasan RAPBD perubahan TA. 2011	18 Oktober 2011
71	903/PIM-DPRP-31/2011	Penyempurnaan atas hasil evaluasi Raperda perubahan APBD TA. 2011	21 Nopember 2011
72	188.3/PIM-DPRP-32/2011	Jadwal Rapat Paripurna DPRP dalam rangka pembahasan raperdasus pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua	16 Desember 2011
73	903/PIM-DPRP-1/2012	Jadwal rapat Paripurna DPRP masa sidang I dalam rangka perubahan RAPBD TA. 2012	10 Februari 2012
74	064/PIM-DPRP-2/2012	Perubahan Atas keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.12/PIM-DPRP/2011 tentang penetapan komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia khusus pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Papua	9 Maret 2012
75	064/PIM-DPRP-4/2012	Penetapan Jadwal tahapan pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur (2012-2017)	9 Maret 2012
76	064/PIM-DPRP-5/2012	Penetapan Jadwal Tahapan pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017	27 April 2012
77	064/PIM-DPRP-11/2012 064/PIM-DPRP-11/2012	Perubahan atas keputusan pimpinan No. 064/PIM-DPRP-5/2012 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2012-2017 Perubahan jadwal PilGub atas keputusan pimpinan nomor 064/PIM-DPRP-5/2012 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan PilGub Provinsi Papua Periode 2012-2017	22 Juni 2012
78	161/PIM-DPRP-14/2012	Jadwal Paripurna Penetapan Komisi dan Pemilihan Kabupaten/Kota Provinsi Papua	5 Juli 2012
79	064/PIM-DPRP-17/2012	Hasil verifikasi dan kharifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua periode 2012-2017	11 JULI 2012
80	064/PIM-DPRP-18/2012	Kunjungan kerja anggota DPRP ke Kabupaten/Kota se-Papua dalam rangka pertanggung jawaban Gubernur APBD Thn 2011	19 Juli 2012
81	064/PIM-DPRP-19/2012	Pembentukan panitia khusus tindak lanjut LHP Bpk RI atas APBD TA. 2011	
82	903/PIM-DPRP-20/2012	Jadwal rapat paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Provinsi Papua TA. 2011 Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA.2011 dan RAPBD perubahan TA.2012	29 Agustus 2012
83	161/PIM-DPRP-21/2012	Perubahan atas keputusan pimpinan DPR Nomor 903/PIM-DPRP-20/2012 tentang jadwal Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka pembahasan LKPJ gubernur provinsi papua TA. 2011, Raperda Pertanggung Jawaban pelaksana APBD TA.2011, RAPBD perubahan TA.2012	
84	903/PIM-DPRP-25/2012	Penetapan jadwal rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka pembahasan RAPBD TA. 2013.	

MEKANISME PEMBENTUKAN RAPERDASI/RAPERDASUS INISIATIF DPR PAPUA

Sesuai Pasal 106 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib

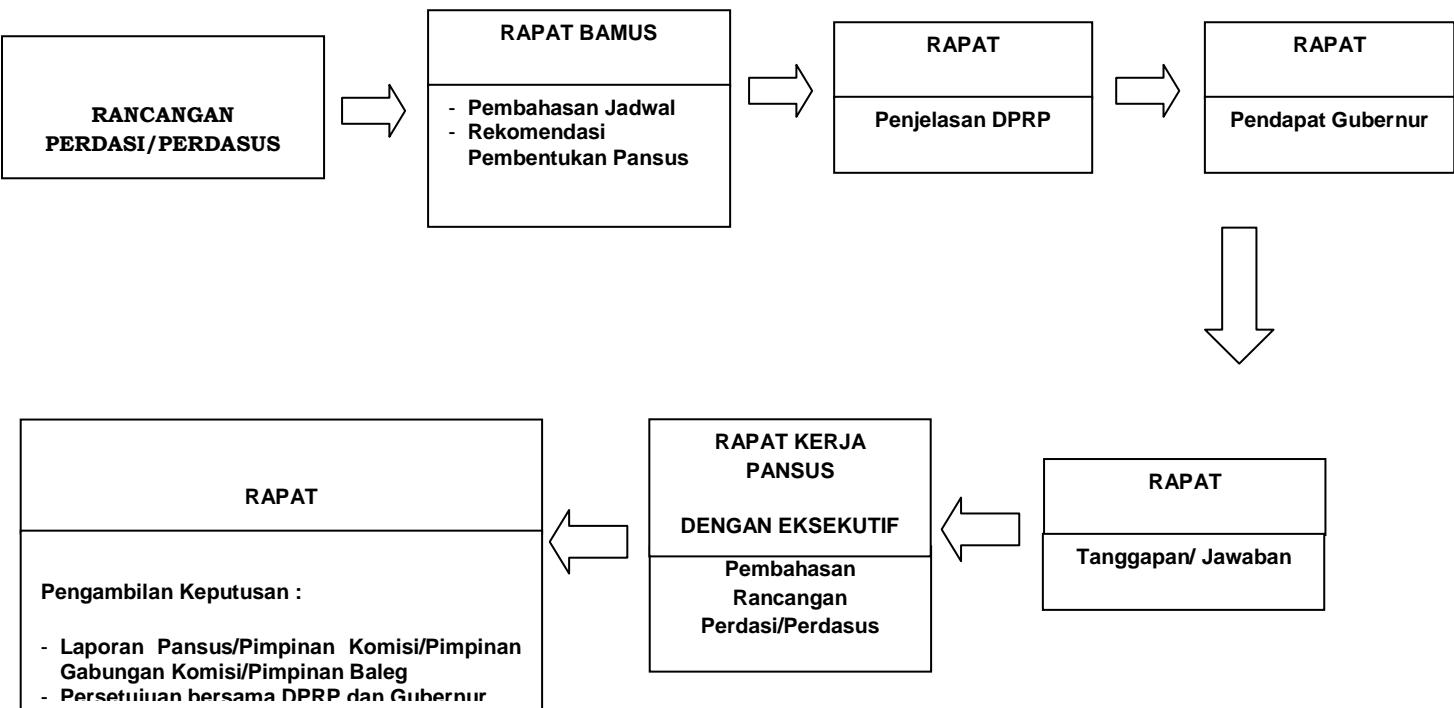
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)



MEKANISME PEMBAHASAN RAPERDASI/RAPERDASUS INISIATIF DPRP

Sesuai Pasal 109 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib

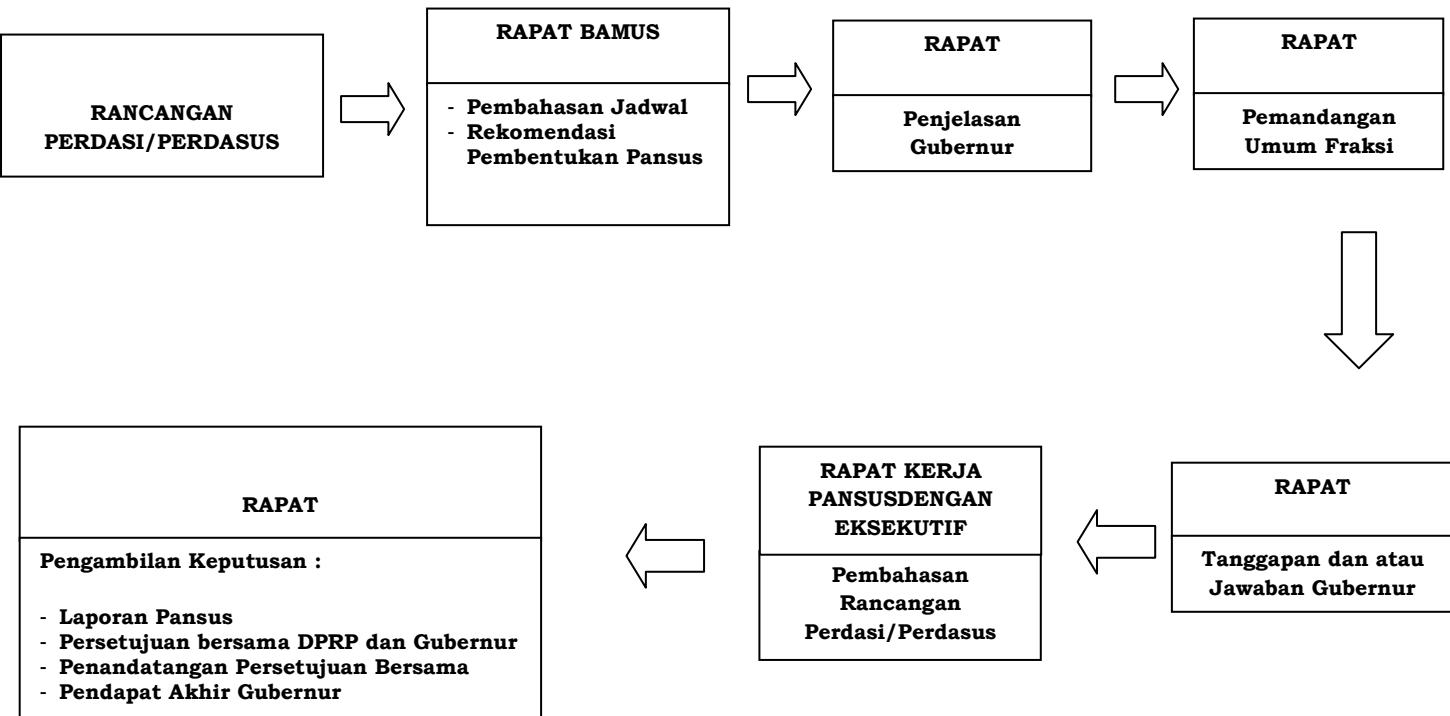
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)



MEKANISME PEMBAHASAN RAPERDASI/RAPERDASUS USULAN EKSEKUTIF

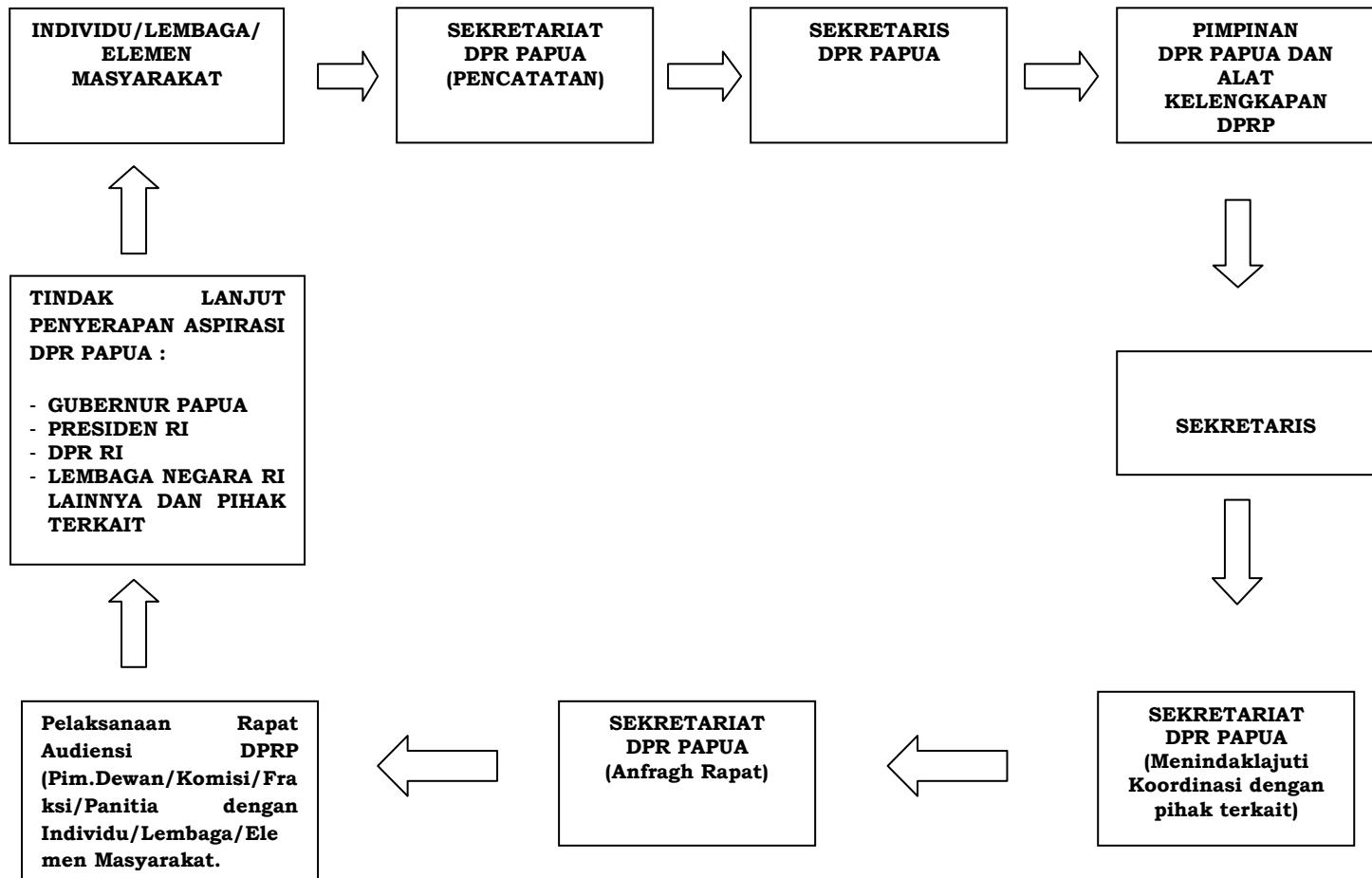
Sesuai Pasal 109 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)



**MEKANISME
 PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DPR PAPUA**

Sesuai Pasal 115 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)



BIODATA ANGGOTA DPR PAPUA MASA BHAKTII 2014 -2019

